

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan isu strategis bagi suatu negara, termasuk Indonesia, yang ingin mencapai swasembada pangan. Tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan internasional, dan pertumbuhan populasi membuat upaya menjamin akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan aman menjadi semakin kompleks. Menanggapi situasi ini, berbagai kerangka kebijakan ketahanan pangan telah dikembangkan dengan tujuan mengatasi risiko krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan melalui produksi pangan berkelanjutan.

Namun, meskipun pedoman ini telah dirancang, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Banyak negara, termasuk Indonesia, cenderung menekankan swasembada pangan melalui pendekatan yang fokus pada produksi beras dan menjaga harga dalam negeri. Selain itu, berbagai langkah kebijakan seperti pembatasan perdagangan dan subsidi input sering kali menghambat efisiensi alokasi sumber daya dan investasi swasta di sektor pertanian. Dengan adanya kebijakan yang berfokus pada beras, reformasi kebijakan diperlukan untuk mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. (Sentosa, 2017)

Beras merupakan produk pangan strategis yang harus terjamin ketersediaannya karena dapat mempengaruhi keadaan perekonomian dan pembangunan nasional serta memerlukan intervensi pemerintah. Selama ini pasokan pangan masyarakat Indonesia sebagian besar masih dijamin oleh beras sebagai makanan pokok. Ketika jumlah penduduk suatu wilayah meningkat maka

konsumsi pangan di wilayah tersebut meningkat, namun ketika konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian meningkat maka produktivitas padi pun menurun.(Rahayu et al., 2019)

Provinsi Jambi adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera bagian tengah, Indonesia. Merupakan daerah penghasil padi dengan potensi pertanian yang tinggi, padi sawah dibudidayakan di 9 kabupaten dan 2 kota. Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan khususnya padi di Provinsi Jambi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal dan menjadikan Jambi sebagai daerah swasembada.

Tabel 1. Lahan Baku Sawah, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Lahan Baku Sawah (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2019	68.394,19	309.932,68	4,53
2020	79.370,57	386.413,49	4,86
2021	65.881,07	298.149,25	4,52
2022	62.119,01	277.743,83	4,47
2023	69.947,16	274.557,09	4,41

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi 2024.

Pada Tabel 1 menunjukkan data luas lahan baku sawah, produksi, dan produktivitas padi di Provinsi Jambi dari tahun 2019 hingga tahun 2023, menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi luas lahan baku sawah dan produksi padi setiap tahunnya. Luas lahan baku sawah masih stabil pada tahun 2019 dan 2020, namun menurun sebesar 3,67 % pada tahun 2021, pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 5,71 %, dan mengalami peningkatan sebesar 12,57 % pada tahun 2023. Produksi mengalami peningkatan pada tahun 2020 Sebesar 24,66 %. Namun produksinya kemudian mengalami penurunan hingga mencapai produksi terendah pada tahun 2023 sebesar 28,95 %. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun

terdapat fluktuasi dalam luas lahan dan produksi, namun belum terdapat peningkatan produktivitas yang signifikan yang dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas pertanian di Provinsi Jambi.

Kegiatan konversi lahan yang dilakukan tidak hanya menyebabkan penurunan tingkat produksi pangan dan penurunan pada kapasitas produksi pangan. Bagi petani konversi pada lahan pertanian menjadi lahan perkebunan merupakan suatu keuntungan karena tingkat pendapatan yang diperoleh dari hasil perkebunan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan dari pertanian. Penghitungan skala ekonomis juga menjadi salah satu faktor petani mengubah dari padi ke kelapa sawit, pada skala ekonomis satu hektar sawah dibandingkan dengan satu hektar kelapa sawit memang lebih menguntungkan sawah. (Landasari et al., 2022)

Tantangan ekonomi yang membuat beras sulit diakses di beberapa wilayah mencakup kurangnya dukungan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, ketidakstabilan harga beras di pasaran sering kali membuat petani enggan menanam padi karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Sebagai alternatif, banyak petani beralih ke komoditas yang dianggap lebih menguntungkan seperti kelapa sawit dan karet. (Yanti et al., 2020)

Namun bertani pekerjaannya lebih banyak, seperti habis panen memulai lagi bertanam dari awal sampai panen lagi, berbeda dengan kelapa sawit yang hanya sekali menanam bisa sampai 25-30 tahun. Lahan termasuk dalam faktor produksi utama, jika tidak ada lahan maka tidak ada proses produksi pangan. Sebuah tantangan yang sangat besar guna mewujudkan Provinsi Jambi menjadi daerah Swasembada dan mengelola dengan baik lahan yang ada menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. (Apriyanto, 2022)

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk (Ribuan Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kerinci	238,7	250,3	251,9	253,9	255,12
2.	Merangin	388,9	354,1	355,7	357,6	368,39
3.	Sarolangun	301,9	290	293,6	298,1	302,24
4.	Batanghari	272,9	301,7	306,7	313,2	312,73
5.	Muaro Jambi	443,4	402,02	406,8	412,8	418,80
6.	Tanjung Jabung Timur	220,0	229,81	231,8	234,2	236,73
7.	Tanjung Jabung Barat	333,9	317,5	320,6	324,5	330,47
8.	Tebo	354,5	337,67	340,9	344,8	350,76
9.	Bungo	374,8	362,36	367,2	373,3	376,38
10.	Kota Jambi	604,7	606,20	612,2	619,6	627,77
11.	Kota Sungai Penuh	90,9	96,61	97,8	99,2	99,77
Jumlah		3.624,6	3.548,2	3.585,1	3.631,1	3.679,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (dalam beberapa terbitan).

Pada tabel 2 Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota selama lima tahun. Kota Jambi memiliki jumlah penduduk tertinggi setiap tahun, dengan peningkatan dari 604,7 ribuan jiwa pada 2019 menjadi 627,77 ribuan jiwa pada 2023. Di sisi lain, Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk terendah, yang tumbuh dari 90,9 ribuan jiwa pada 2019 menjadi 99,77 ribuan jiwa pada 2023. Beberapa daerah, seperti Merangin dan Muaro Jambi, mengalami penurunan jumlah penduduk pada awal periode (2020), tetapi meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, total penduduk di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan dari 3.624,6 ribuan jiwa pada 2019 menjadi 3.679,1 ribuan jiwa pada 2023. (BPS Jambi, 2024)

Tabel 3. Tingkat Produksi Gabah Kering Giling, Produksi Beras dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jambi tahun 2019-2023.

Tahun	Produksi Gabah Kering Giling (Ton)	Konversi dari GKG ke Beras (Ton)	Total Kebutuhan Beras Perkapita (Ton)	Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Th)
2019	309.932,68	178.364,34	286.669,61	79,09
2020	386.413,49	222.378,58	285.984,92	80,60
2021	298.149,25	172.471,54	290.966,71	81,16
2022	277.743,83	160.667,47	286.675,34	78,95
2023	274.557,09	158.824,09	285.534,95	77,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, Jambi Dalam Angka Tahun 2019-2023 (Hasil Olahan Sendiri).

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Provinsi Jambi 3.679,1 ribu jiwa dengan produksi padi yang dihasilkan sebanyak 274,557,09 GKG, setelah dikonversi menjadi 158.824,09 Ton beras. Berdasarkan tingkat konsumsi beras rata – rata penduduk Jambi sebesar 77,61 Kg/Kapita/Tahun atau sebesar 0,212 Kg/Kapita/Tahun. Sementara perhitungan kebutuhan beras yang diperlukan sebesar 285.534,95 Ton, ini berarti ketersediaan beras di Provinsi Jambi pada tahun 2023 tidak mencukupi dari kebutuhan konsumsi yang seharusnya dibutuhkan sehingga mengharuskan untuk mengimpor beras dari luar daerah seperti Sumatera Selatan dan Lampung untuk memenuhi kekurangan beras di Provinsi Jambi.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat di perkotaan, masyarakat di Kota mulai beralih dari ketergantungan pada beras ke berbagai alternatif pangan yang dianggap lebih sehat dan bernilai gizi tinggi. Sumber karbohidrat lain seperti kentang, ubi jalar, dan jagung kini semakin diminati terutama oleh kalangan muda yang peduli terhadap kesehatan serta ingin menjaga berat badan yang ideal. Diversifikasi pola konsumsi pangan ini menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan beras, terutama di

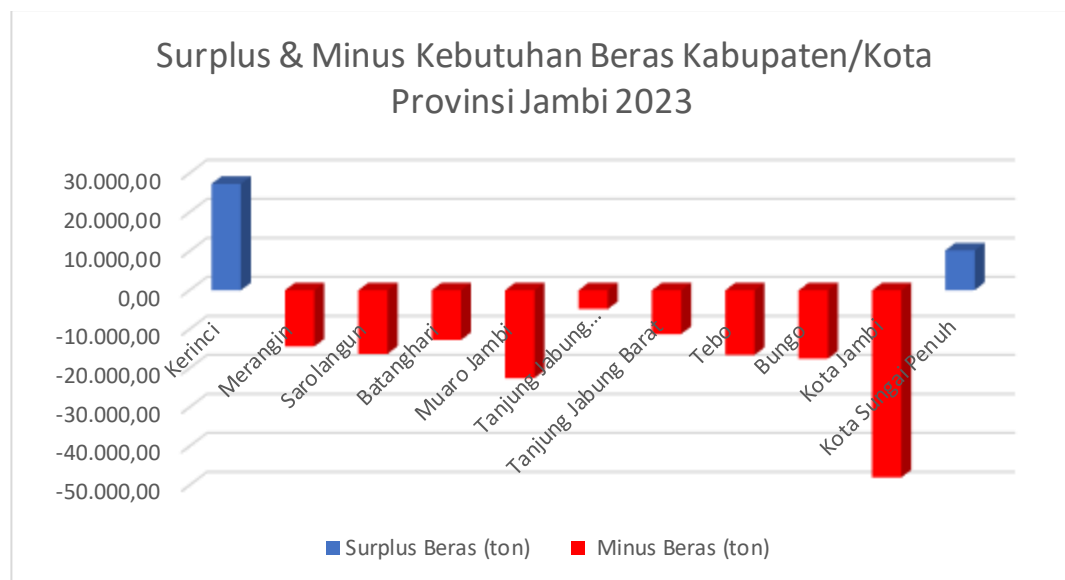
wilayah perkotaan yang memiliki akses lebih luas terhadap bahan pangan alternatif.(Suryani & Rachman, 2008)

Selain meningkatnya minat pada sumber karbohidrat alternatif, tren konsumsi makanan instan seperti roti dan produk berbahan dasar gandum juga mulai menggantikan posisi beras dalam pola makan masyarakat perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang semakin cepat dan praktis, serta meningkatnya konsumsi makanan dari restoran dan gerai makanan cepat saji. Namun, masyarakat pedesaan umumnya masih bergantung pada beras sebagai makanan pokok utama, mengingat keterbatasan akses terhadap sumber pangan lain dan tradisi yang masih kuat dalam konsumsi nasi.(Suryani & Rachman, 2008)

Jika dibedakan menurut golongan pendapatan, konsumsi beras per kapita terbesar terdapat pada golongan pendapatan menengah. Sementara itu rendahnya tingkat konsumsi per kapita masyarakat golongan berpendapatan tinggi lebih dikarenakan oleh perubahan gaya hidup. Dengan demikian, peningkatan pendapatan penduduk menengah ke bawah mendorong naiknya konsumsi beras, sementara untuk kelompok kaya akan menurunkan konsumsi beras secara total. Secara umum, konsumsi beras relatif tidak sensitif terhadap pendapatan. Peningkatan pendapatan seseorang tidak akan meningkatkan kuantitas beras yang dikonsumsi. Kalaupun ada perubahan, hal itu lebih pada kualitas beras yang dikonsumsi.(Sugiyanto, 2006)

Kelompok usia produktif yaitu masyarakat yang berada pada rentang usia 15-64 tahun, cenderung memiliki konsumsi beras yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Aktivitas yang lebih padat dan kebutuhan energi yang besar membuat masyarakat tetap memilih nasi sebagai sumber karbohidrat utama.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat indikasi bahwa kelompok usia muda (20-35 tahun) mulai mengurangi konsumsi beras dan lebih memilih makanan sehat yang rendah karbohidrat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.(Andriani, 2022)



Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, Jambi Dalam Angka Tahun 2023
(Hasil Olahan Sendiri).

Gambar 1. Grafik Daerah Surplus dan Minus Kebutuhan Beras Provinsi Jambi Tahun 2023.

Grafik menunjukkan kondisi surplus dan defisit kebutuhan beras di kabupaten/kota Provinsi Jambi pada tahun 2023. Kabupaten Kerinci mencatatkan surplus beras terbesar, sekitar 30.000 ton, yang ditandai dengan batang biru yang tinggi. Kota Sungai Penuh juga mengalami surplus, namun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan Kerinci. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya dua wilayah di Provinsi Jambi yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan memiliki kelebihan produksi. Faktor yang berkontribusi pada surplus ini meliputi produktivitas lahan.

Sebaliknya, sebagian besar kabupaten dan kota lainnya menunjukkan defisit beras, seperti yang diilustrasikan dengan batang merah di bawah garis nol. Kota

Jambi dan Kota Sungai penuh mengalami defisit beras paling besar, mendekati 50.000 ton. Kabupaten lain seperti Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur juga menunjukkan defisit yang signifikan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Defisit ini menandakan bahwa produksi beras di wilayah-wilayah tersebut tidak mencukupi kebutuhan penduduk setempat, sehingga berpotensi membutuhkan pasokan dari wilayah lain atau provinsi luar. Situasi ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi atau mengatur distribusi beras yang lebih merata.

Berdasarkan data informasi dari Perum Bulog Kanwil Jambi, stock beras di Provinsi Jambi saat ini mencapai 10.876.672 kg dengan ketahanan stok diperkirakan selama empat bulan, mengingat kebutuhan distribusi sekitar 2.719 kg per bulan. Hanya sekitar 3% beras yang berasal dari produksi lokal Jambi, sementara 97% lainnya diimpor dari Lampung, Sumatera Selatan dan Pulau Jawa. Diketahui bahwa Kabupaten Kerinci menjual hasil panennya ke Sumatera Barat. Dengan kapasitas gudang mencapai 21.500.000 kg, Bulog menjual sekitar 23.100.000 kg beras per tahun untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu upaya strategis untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah berkomitmen menjaga agar lahan sawah tidak terus-menerus mengalami alih fungsi menjadi peruntukan non-pertanian. Di Provinsi Jambi, ancaman terhadap keberlanjutan lahan sawah terjadi akibat tingginya konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu,

kebijakan LP2B diharapkan dapat mendukung pencapaian swasembada beras dan menjaga ketahanan pangan daerah. (Hambali et al., 2021)

Implementasi LP2B di Provinsi Jambi masih belum optimal. Berdasarkan data luas baku sawah per kabupaten/kota yang ada, total luas baku sawah Provinsi Jambi mencapai 269.246 hektar. Namun, berdasarkan hasil pendataan, baru sekitar 93.957 hektar yang telah ditetapkan secara resmi sebagai LP2B melalui Peraturan Daerah. Beberapa kabupaten dengan kontribusi besar terhadap luas sawah antara lain Tebo 36.162 ha, Muaro Jambi 38.154 ha, Tanjung Jabung Barat 54.879 ha, dan Kerinci 33.022 ha. tingginya alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit menjadi kendala utama implementasi LP2B di Jambi. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda LP2B di daerah. (Wicaksono et al., 2020)

Upaya melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 pada Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur perlindungan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam suatu peraturan daerah. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar segera diwujudkan dalam bentuk inisiasi kebijakan daerah seperti pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilindungi. (Zulkarnain, 2020).

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, Konversi lahan pertanian menimbulkan

ancaman terhadap ketahanan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, serta mempunyai implikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik dan kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang bergantung pada lahan dalam pertanian. Konversi lahan pertanian di Provinsi Jambi akhir-akhir ini menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. (Hambali et al., 2021)

Pengendalian pada alih fungsi lahan pertanian pangan melalui penetapan kawasan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar keadaan tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam mewujudkan swasembada beras di Provinsi Jambi. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Peramalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Mewujudkan Swasembada Beras di Provinsi Jambi”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berbagai teori tentang dinamika populasi dan pangan telah menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan ketersediaan pangan merupakan dua hal yang sulit untuk selalu seimbang. Teori Malthusian mengemukakan bahwa populasi manusia bertambah secara eksponensial, sedangkan kapasitas produksi pangan meningkat secara aritmetis, menciptakan ketimpangan yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Kondisi ini juga dirasakan di Indonesia, yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta kebutuhan pangan pokok yang sangat bergantung pada beras. Selain itu, masalah kekurangan gizi yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia menambah beban pemerintah untuk terus

meningkatkan produksi pangan agar cukup memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah.

Di Provinsi Jambi, upaya peningkatan produktivitas padi telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, produktivitas ini tetap dibatasi oleh konversi lahan pertanian ke sektor-sektor non-pertanian, yang berdampak signifikan pada produksi pangan dan mengancam swasembada beras di daerah tersebut. Statistik menunjukkan adanya penurunan luas panen padi di Jambi dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan. Jika alih fungsi lahan ini terus terjadi, kemampuan Provinsi Jambi tidak bisa menjadi daerah swasembada. Selain itu, lahan pertanian yang cukup dan terkelola dengan baik menjadi syarat utama untuk menjaga produktivitas pertanian serta memastikan ketersediaan pangan bagi populasi yang terus bertambah.

Dalam rangka mendorong ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Jambi telah berusaha mengendalikan laju konversi lahan dengan menciptakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dari perubahan fungsi yang tidak terencana agar tetap tersedia sebagai sumber produksi pangan, terutama beras yang merupakan makanan pokok masyarakat setempat. Diharapkan, melalui kebijakan LP2B, lahan pertanian di Jambi dapat dijaga agar tetap produktif dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, meskipun populasi terus bertambah dan tekanan terhadap lahan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar Luas lahan Sawah yang harus tersedia agar Provinsi Jambi Swasembada Beras?
2. Seberapa besar Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jambi pada tahun 2024-2033?
3. Seberapa besar Proyeksi perubahan kebutuhan luas lahan mempengaruhi status surplus atau defisit beras di kabupaten/kota di Provinsi Jambi?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar Luas lahan sawah yang harus tersedia agar Provinsi Jambi Swasembada Beras.
2. Untuk memproyeksi kebutuhan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jambi pada tahun 2024-2033.
3. Untuk mendeskripsikan seberapa besar perubahan kebutuhan luas lahan mempengaruhi status surplus atau defisit beras di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan peneliti tentang Kebutuhan Luas Lahan Sawah yang diperlukan untuk mendukung Swasembada Beras di Provinsi Jambi.
2. Sebagai informasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait Proyeksi Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jambi untuk tahun 2024-2033.

3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pengaruh Perubahan Kebutuhan Lahan terhadap Status Surplus atau Defisit Beras di Provinsi Jambi.